

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan pada suatu wilayah, tentunya dibutuhkan peran beberapa aktor agar terjadinya sinergi sebagai penunjang untuk tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Dalam aktor-aktor ini tentunya memiliki peran masing-masing dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Jika suatu program pembangunan menghasilkan *impact* yang baik, sesuai tujuan dan terdapat perubahan-perubahan nyata, berarti dalam pengolaan suatu program ini sudah dikatakan sangat baik, dan tentunya dalam pengelolaan program pembangunan ini terdapat pola-pola jaringan yang terjadi di dalamnya atau biasa disebut dengan *network governance*.

Penelitian ini mengangkat mengenai bagaimana dan seperti apa pengelolaan pada program CSR PT. Pupuk Kaltim yaitu *Better Living in Malahing* dalam aspek pembangunan infrastruktur di Kampung Malahing, Bontang, Kalimantan Timur jika dilihat dalam perspektif *network governance*. Selain mengangkat mengenai bagaimana dan seperti apa pengelolaan program ini, di sini akan membahas juga mengapa program ini dibentuk serta mengulik perjalanan proses terbentuknya program ini dan perubahan-perubahan nyata apa saja yang telah mengubah kehidupan di Kampung Malahing, karena program ini merupakan program berkelanjutan yang diharapkan bisa memperbaiki dan mengurangi permasalahan taraf hidup rendah di Kota Bontang.

Kota Bontang adalah sebuah kota yang berada di Kalimantan Timur dan kota ini berkembangnya kota ini beriringan dengan tumbuhnya dua industri raksasa yaitu: PT Badak LNG dan PT Pupuk Kaltim yang beroperasi di kota ini. Selain adanya potensi dalam industri migas, Bontang memiliki potensi bentang alam berupa bibir pantai yang merupakan habitat mangrove. Selain mencegah adanya erosi pada garis pantai, mangrove juga berperan sebagai tempat tinggal bagi sejumlah satwa liar.

Di lepas pantai Pulau Kalimantan, tepatnya pada sisi timur Kota Bontang terdapat komunitas masyarakat yang tinggal di perkampungan apung. Pada tahun 2015, komunitas ini terdiri dari kurang lebih 52-60 KK yang mendiami rumah-rumah kayu apung. Masyarakat ini merupakan nelayan yang berasal dari Sulawesi Barat yang telah mulai mendiami kampung Malahing sejak tahun 1999. Pada awalnya, rumah yang dibangun di Malahing ini bertujuan untuk memudahkan nelayan mencari ikan agar tidak perlu pulang-pergi ke daratan.

Komunitas apung Malahing ini menjadi komunitas yang sangat unik dan langka, yang dimana hidup keseharian mereka dilakukan di atas laut lepas dan memiliki ciri khusus yang telah membentuk budaya sendiri, namun karena bersifat khusus ini komunitas Malahing dapat dikatakan cukup rentan. Hal ini dikarenakan kondisi mereka yang masih jauh dari kata layak, sehingga mereka memerlukan adanya peningkatan taraf hidup. Namun di sisi lain, dengan adanya over-exposed terhadap kemajuan dapat mengancam keberlanjutan hidup komunitas ini. Maka diperlukan perencanaan kawasan Malahing yang didasarkan kepada tujuan untuk melakukan konservasi terhadap komunitas Malahing, terhadap lingkungan Kampung Malahing, dan bagi masyarakat Kampung Malahing. Kampung Nelayan Malahing merupakan kampung yang dihuni oleh 52-60 Kepala Keluarga yang terletak di tengah laut di Kota Bontang. Kampung ini pertama kali berdiri pada tahun awal 2000, kemudian mulai ramai oleh adanya penduduk pada tahun 2005.

Mayoritas mata pencaharian di kampung ini adalah sebagai nelayan dan petani rumput laut. Dulunya kampung ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pihak perusahaan di Kota Bontang. Dikarenakan tidak mendapatkan perhatian, kampung ini sangat mengalami kesulitan untuk dapat menikmati infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai, serta warga rentan di bawah garis kemiskinan.

¹ Laporan Kinerja Tahun Kedua RPJMD Kaltim 2013-2018

² Setiawan, Baki & Sugiyanti, Catur. 2007. *Infrastruktur dan Pengurangan Kemiskinan*. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM. Yogyakarta.

Butuh waktu lebih dari satu dekade bagi warga di kampung ini untuk dapat menikmati sinar lampu di malam hari hinggamenikmati hidup layak.³

Selain sulitnya dalam mendapatkan akses listrik, terdapat pula berbagai macam permasalahan yang dulu sempat dialami oleh kampung ini. Dulunya, anak warga Kampung Nelayan Malahing diharuskan untuk menyeberangi lautan menggunakan *ketinting* selama kurang lebih 25 menit perjalanan, guna dapat sampai ke sekolah yang berada di daratan. Hal tersebut dikarenakan di Kampung Nelayan Malahing tidak terdapat bangunan sekolah dan tenaga kerja guru yang memadai. Lalu pada hal kesehatan, dulunya tidak ada posyandu, serta sulitnya mengakses air bersih. Permasalahan yang selalu dialami oleh kampung ini adalah, dikarenakan terletak di tengah-tengah laut, maka kampung tersebut sangat rentan untuk diterpa badai, serta mengalami masalah terkait surutnya air laut. Jika hujan badai menerjang, banyak rumah warga hingga fasilitas umum yang rusak. Belum lagi jika surutnya air laut, warga kampung ini sangat sulit itu mengakses ke daratan, dan mau tidak mau warga harus memutar jauh agar dapat ke daratan.

Segala keterbatasan tersebut tentunya mempengaruhi perilaku masyarakat di mana dengan keadaan hidup seadanya, menimbulkan lingkungan kumuh yang bisa mencemari ekosistem laut dan perilaku tidak sehat. Terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup di Kampung Malahing ini, yaitu pada aspek ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan serta perbaikan infrastruktur.⁴ Dengan permasalahan pada lima aspek di Kampung Malahing, maka muncul gagasan Better Living in Malahing, yang di mana program ini merupakan program berkelanjutan yang berfokus terhadap pembinaan di kawasan pesisir yang dilakukan oleh Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pupuk Kaltim sehingga dalam masyarakat Kampung Malahing ini terdapat peningkatan kesejahteraan.

³ Kumparan News. 2018. *Perjalanan Satu Dekade Kampung Malahing Bontang Lepas dari Gulita*. Kumparan. <https://kumparan.com/>

⁴ Pupuk Kaltim. 2019. *Berhasil Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Pesisir, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan Area 2019*. <https://www.pupukaltim.com/>

Tidak hanya mengenai lingkungan dan infrastruktur saja, program ini juga berusaha untuk memberikan bantuan mengenai pola pikir dan pemberdayaan masyarakat. Namun di sini peneliti ingin membahas mengenai aspek infrastruktur yang berdampak bagi kehidupan di Kampung Nelayan Malahing.

Dalam proses pembangunan dari suatu wilayah tentunya tidak lepas dari peranan pemerintah, masyarakat dan pihak lain yaitu swasta. Peran-peran ini kemudian tergabung dalam suatu pola yang kemudian dinamakan dengan proses pembangunan yaitu *network governance*. Dalam *network governance* ini pemerintah tidak lagi menjadi aktor yang paling menentukan. Pemerintah dalam pola tersebut melakukan kerjasama dengan aktor-aktor lain dalam penyelesaian suatu masalah publik.⁵ Aktor lain ini adalah aktor *non-state*, seperti sektor bisnis dan *civil society*. Salah satu bentuk masalah publik di sini adalah pemerataan pembangunan wilayah yang dimana dengan adanya kebijakan ini, secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penduduk, pelaku usaha, pengunjung, pemerintah daerah, dan pelaku lain di setiap daerah.

Sesuai dengan Pasal 74 No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (PT), perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.⁶ Manfaat ini tentunya dapat dirasakan oleh Perseroan sendiri ataupun masyarakat setempat. Secara nyata pembangunan di Kampung Malahing ini dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah selaku regulator dan *stakeholder* lainnya yang turut bertanggungjawab dalam pembangunan daerah. Dalam Peraturan Walikota Bontang (PERWALI) Nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang memiliki tujuan yaitu menyelaraskan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari hasil pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah dan stakeholder dalam

⁵ Klijin, EH. & Koppenjan, J. 2016. *Governance Networks in the Public Sector*. London: Routledge.

⁶ P, Widyana Sofie. 2012. *Corporate Social Responsibility Oleh Perseroan Terbatas*. Hukum Perseroan Terbatas. <https://www.hukumperseroanterbatas.com/>. Diakses pada 2 November 2020.

penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan maka terbentuklah adanya Forum CSR.⁷

Perusahaan yang tidak memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan, pada akhirnya operasi perusahaan dan kehadiran perusahaan hanya dianggap mengeksploitasi sumber daya alam saja, tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat sekitar khususnya terkait masalah ekonomi.⁸ Adanya kawasan Industri berpengaruh besar terhadap perubahan tenaga sektoral, yakni yang semula dari agraris menjadi industri, serta perubahan tersebut juga diikuti dengan perubahan-perubahan pola hidup masyarakat.⁹ Dalam perubahan ini tentunya tidak semua masyarakat dapat mengikut perubahan ini atau tidak dapat beradaptasi. Tanggung jawab dalam sosial dan lingkungan semakin besar apabila disandingkan dengan jenis perusahaan pengelola sumber daya alam serta jenis perusahaan yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap perubahan dalam sosial dan lingkungan. Dalam pembangunan keberlanjutan, tolak ukurnya ditentukan oleh sejauh mana perusahaan dapat mengelola hubungan dengan masyarakat melalui CSR. Terlaksananya CSR dengan baik ini merupakan salah satu tujuan dari penerapan dari *Good Corporate Governance (GCG)*. Dalam perusahaan industri tentunya memiliki acuan yang memiliki tata kelola yang baik.

Penelitian mengenai bagaimana pola yang terjadi dalam program yang dilakukan oleh CSR dalam studi kasus network governance sebelumnya pernah diteliti oleh Anyndya Jatu Parmalika. Anyndya meneliti mengenai efektivitas dalam pengelolaan CSR PT. Badak NGL, Bontang dan fokus penelitiannya di daerah buffer zone PT. Badak NGL yaitu Bontang Selatan. Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan oleh

⁷ Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan

⁸ Parmalika, Jatu Anyndya. 2018. Efektivitas dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility PT. Badak NGL, Bontang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

⁹ Gunawan & Rahayu, Isye. 2005. *Penelitian Pengembangan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar Kawasan Industri*. Jakarta. Departemen Sosial Republik Indonesia.

Anyndya dibagi menjadi dua bagian yang sesuai dengan fokus penelitian yang ditunjukkan dengan pertanyaan penelitian yaitu mengenai adanya pengaruh interaksi terhadap pengelolaan program CSR.

Dalam penelitian ini menghasilkan jawaban yaitu Adanya sinergi kemitraan yang melibatkan beberapa *stakeholder* didalamnya, dapat menjadikan interaksi yang efektif dengan adanya keberhasilan pencapaian program tiap tahunnya dan menjadikan program tersebut berhasil mandiri. Hal ini tentunya tidak terlepas hubungan dari pihak-pihak terkait mengenai interaksi antar *stakeholder*. Dalam pelaksanaannya, tiap *stakeholder* telah memiliki peran dan fungsi masing-masing sehingga terjadi koordinasi yang baik serta mneghasilkankeefektifan suatu program. Hal ini dapat dilihatadanya koordinasi dan komunikasi dalam proses pelaksanaannya melalui forum CSR, forum FKPD, Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Dengan forum tersebut yang diadakan oleh pemerintah guna mengsinergikan program-program CSR.¹⁰

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Anyndya ini kurang membahas mengenai teori *network governance* yang di mana tidak sesuai dengan judulnya, namun di sini Anyndya lebih membahas mengenai *good governance* dalam penelitiannya. Maka, dalam penelitian saya ini saya akan membahas mengenai pola *network governance* yang terjadi pada setiap aktor yang terlibat, karena sesuai dengan judul saya menggunakan teori *network governance* bukan *good governance*. Dengan hal ini perusahaan berperan penting dalam membantu pemerintah terhadap kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang. Pemerintah Kota Bontang pun berharap agar perusahaan di Kota Bontang ini berperan aktif melalui CSR masing-masing perusahaan untuk kemajuan dan pembangunan kota yang tentunya sejauh ini sudah dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim dengan salah satu programnya yaitu Better Living in Malahing.

Dalam proses melakukan tanggung jawab PT. Pupuk Kaltim (PKT) di sini terdapat relasi yang dilakukan antara PKT, Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat.

CSR PKT memberikan kontribusinya dalam mencapai target yaitu pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹¹ CSR PT. Pupuk Kaltim tentunya memiliki komitmen yang berkelanjutan yang diterbitkan di SKD No. 69/DIR/IX.2012 mengenai Kebijakan CSR Pupuk Kaltim yang berisi, pertama bahwa CSR Pupuk Kaltim terintegrasi dengan Kebijakan Perusahaan, mulai dari perencanaan, implementasi, pelaporan hingga publikasi CSR. Kedua, CSR Pupuk Kaltim mengedepankan pendekatan kemitraan strategis *Academic, Business, Government, dan Community (ABGC)*. Ketiga, CSR Pupuk Kaltim mengutamakan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan dukungan proses pendampingan, dan dimana segala pelaksanaan dan indikator yang dilakukan oleh CSR Pupuk Kaltim selalu mengacu pada regulasi nasional dan global (ISO 26000)¹².

Dengan uraian yang telah dijelaskan di atas, tentunya dapat dipahami bahwa dalam proses pencapaian program CSR terdapat koordinasi antar *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam menjalankan peran serta menjalin relasi kemitraan untuk saling bersinergi. Dengan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran masing-masing aktor dalam program “*Better Living in Malahing*” dan setelah mengetahui peran dan *power* masing-masing aktor ini peneliti ingin melihat proses pembangunan infrastruktur di Kampung Malahing jika dilihat dalam perspektif *network governance*.

1.2 Rumusan Masalah

PT. Pupuk Kaltim merupakan salah satu perusahaan besar yang berada di Kota Bontang yang berkontribusi besar terhadap Pembangunan di kota ini. Tentunya dalam proses pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kampung Malahing, berkaitan dengan konteks *network governance*. Dengan terjalannya

¹¹ Pupuk Kaltim. 2018. *VISI, MISI DAN NILAI – NILAI CSR PUPUK KALTIM*. Tentang CSR. <https://www.pupukkaltim.com>. Diakses pada 1 November 2020.

¹² PT. Pupuk Kalimantan Timur. 2017. *TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*. Laporan Tahunan 2016 Annual Report.

network governance dalam pembangunan di Kampung Malahing ini peneliti akan membahas mengenai pola *network governance* dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh CSR PT. Pupuk Kaltim, dan bagaimana peran masing-masing aktor dalam upaya pembangunan berkelanjutan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses hadirnya program “*Better Living in Malahing*” yang dibentuk oleh CSR PT. Pupuk Kaltim?
2. Bagaimana peran masing-masing aktor dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Malahing dalam program “*Better Living in Malahing*” dari perspektif *network governance*?
3. Bagaimana pola *network governance* yang terjadi pada proses pembangunan infrastruktur dalam Program *Better Living in Malahing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan pola interaksi yang dilakukan Pemerintah dan PT. Pupuk Kaltim untuk masyarakat dalam menjalin relasi kemitraan melalui program *Corporate Social Responsibility* dalam upaya mensejahterakan masyarakat sekitar zona CSR PT. Pupuk Kaltim, dan untuk mengetahui koordinasi antara Pemerintah kota, PT. Pupuk Kaltim dan masyarakat serta untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Program CSR “*Better Living in Malahing*” yang telah dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kaltim hingga saat ini jika dilihat dalam sudut pandang *network governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Bagi PT. Pupuk Kaltim

- Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi atau masukan baru bagi PT. Pupuk Kaltim dan dapat dijadikan rapor bagi CSR PT. Pupuk Kaltim mengenai sudah seberapa efektif program ini dijalankan.

Bagi Perusahaan Lain

- Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan *best practice* untuk perusahaan lainnya mengenai dari interaksi dalam menjalin kemitraan yang bagik dalam CSR agar lebih maksimal dan berisinergi.

Bagi Pemerintah

- Dengan adanya penelitian ini agar memberi masukan kepada pemerintah mengenai peran pemerintah agar lebih baik dalam melakukan interaksi dan kerjasama dalam penererapan *Good Governance* dan *Governance Network*.

Bagi Masyarakat

- Dengan adanya penelitian ini diharap dapat menambah wawasan masyarakat megenai peran dan fungsi dari Pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri dalam dalam konsep *network governance* serta mengetahui seberapa efektif program CSR bila dilihat dalam prespektif *network governance*.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Relasi Aktor yang Otonom

Dalam membuat kebijakan tentunya melibatkan aktor-aktor yang ada baik aktor pemerintah maupun dari swasta. Hal ini juga terjadi pada studi kasus pembangunan infrastruktur di Kampung Malahing. Dimana aktor yang terlibat ialah PT Pupuk Kaltim melalui Departemen CSR, Pemerintah Kota Bontang meliputi beberapa dinas serta masyarakat Kampung Malahing sendiri. Aktor yang terlibat dalam proses pembangunan infratraktur ini memiliki peran dan kewenangan yang berbeda-beda juga, maka dalam prosesnya pun tidak ada campur tangan dari aktor lain karena relasi yang terjadi pada setiap aktor ini bersifat otonom, tidak adanya campur yang dimaksud di sini adalah dalam pengambilan keputusan tidak ada aktor yang mendominasi sehingga tidak adanya ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya relasi actor yang otonomi ini sesuai dengan konsep pada *network governance*.

1.5.2 Menjaga Interdependensi dan Kerjasama

Interdependensi merupakan suatu konsep saling ketergantungan yang disebabkan oleh adanya kerjasama yang tercipta antara dua actor atau lebih karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Secara sederhana, interdependensi merupakan hubungan timbal balik atau saling bergantung, yang dimana suatu pihak tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara utuh. Maka, dibutuhkan adanya peran dari pihak atau actor lain sebagai pelengkap untuk melakukan suatu interaksi. Hal ini sesuai dengan relasi yang terjalin antar actor yang terlibat dalam program better living in malahing yang dimana dengan adanya interdependensi di program ini agar tau mengenai kekurangan dan keunggulan masing-masing actor yang pada akhirnya terdapat proses tawar menawar di dalamnya dan menemukan solusi dan jalan keluar agar terciptanya tujuan bersama, dan konsep ini merupakan salah satu konsep dalam *network governance*.

1.5.3 Mengelola Sumber Daya Bersama dan Memaksimalkan

Kemanfaatan Bersama

Dalam program Better Living in Malahing, hal yang perlu diperhatikan tidak lah mengenai sumber daya alam yang ada di Kampung Malahing saja. Namun elemen-elemen penunjang terciptanya tujuan akhir yang diharapkan tentu harus diperhatikan juga, yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini. Aktor-aktor yang terlibat dalam program ini tentunya memiliki latar belakang keahlian yang berbeda, maka perlunya untuk mengelola sumber daya bersama agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di Kampung Malahing. Mulai dari pemerintah daerah, masing-masing dinas tentunya memiliki keahlian yang berbeda-beda, seperti dinkes dan disopar tentunya memiliki keahlian berbeda walaupun keduanya sama-sama instansi pemerintah. Lalu ada PT Pupuk Kaltim yang merupakan perusahaan BUMN yang tentunya latar belakang keahlian yang dimilikinya jauh lebih kompleks, karena terdapat beberapa departemen yang terlibat. Dalam konsep memaksimalkan kemanfaatan bersama ini adanya tuntutan bahwa peran serta atau keterlibatan para aktor bukan sebagai partisipan, tetapi lebih kepada saling

menguntungkan di antara aktor yang terlibat. Dalam memaksimalkan kemanfaatan bersama ini terdapat tindakan yang perlu melibatkan semua stakeholders dalam setiap mengambil keputusan.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Network Governance

Awal istilah konsep *governance* ini dari kata *government* yaitu pemerintah, dimana istilah ini digunakan pada suatu lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan kekuasaan pada pemerintahan di suatu negara. Konsep ini disebut sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada institusi atau lembaga pemertintah sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah, maka muncullah konsep *governance* yang hadir untuk menggantikan konsep *government* pada aspek-aspek yang ada maupun kajian pemerintahan. *Governance* ini berasal dari kata “*govern*” yaitu mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari segala proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif pada masyarakat. Maka jika disimpulkan dengan arti yang luas, *governance* ini merangkup semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Dwiyanto di buku “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik” yaitu dimana konsep *governance* ini adanya keterlibatan aktor-aktor yang di luar pemerintah yang merespon permasalahan publik. Dengan ini praktik *governance* bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan actor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar. Dalam *governance* ini pun dalam fungsi pengelolaan masyarakat yang kompleks tentunya berkoordinasi dengan banyak lembaga di sektor publik maupun swasta, dan peran pemerintah di sini bukan satu-satunya actor dan tidak lagi selalu menjadi pelopor. Disebutkan bahwa dalam *governance* ini terdapat pola relasi antar actor yaitu ada negara, sector swasta dan masyarakat sipil.

Negara memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan politik dan

hukum yang kondusif. Sektor swasta memiliki tugas untuk menyediakan lapangan kerja dan penghasilan, dan masyarakat sipil di sini memfasilitasi interaksi sosial politik dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Dalam *governance* ini terdapat turunannya yaitu *network governance*. Dalam *network governance* ini terdapat networking di dalam pemerintah, masyarakat maupun pemerintah dengan masyarakat. Dengan adanya networking ini untuk menghindari konflik dalam mengelola urusan publik. Networking ini meliputi terjadinya pertukaran sumber daya dalam proses interaksinya. *Network governance* ini merupakan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan

Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan Pengelolaan Program CSR PT. Pupuk Kaltim "*Better Living in Malahing*" ini adalah menggunakan teori *Network Governance* dari Sandra Beach dan Robyn L. Keast yaitu di mana Sandra dan Robyn menjelaskan bahwa *network governance* ini suatu pemerintahan yang berbentuk lebih kolaboratif dan dijelaskan juga terdapat beberapa jenis jaringan dapat dibagi menjadi model yang saling bergantung dan horizontal, tetapi aktor yang terlibat dalam operasi bersifat otonom, dan ada berbagai bentuk interaksi, melalui negosiasi, dan dengan demikian untuk operasi atau program tertentu di lapangan.

Penjelasan dari Sandra dan Robyn ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme dalam jaringan kerjasama yang kolektif. Mekanisme yang diadopsi dirancang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para aktor yang melakukan kerjasama jenis ini. Pada saat inilah terdapat proses negosiasi yang dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan aktor lainnya dan memiliki kemampuan untuk self-organizing atau selfgoverning untuk mewujudkan tujuan publik. Di sinilah bentuk keunikan dari kerjasama berbasis jaringan, yang di mana ini berbeda dengan kemitraan karena kemitraan lebih bersifat formal. Dalam mencapai tujuan akhir tentunya sebuah network perlu

dipastikan apakah berjalan dengan baik atau tidak, karena hal ini

memerlukan relasi yang baik di antara aktor-aktor dalam network. Untuk mengetahui apakah sebuah network dapat berjalan dengan baik terdapat empat variabel yang harus dipenuhi oleh masing-masing stakeholder, yaitu:

1. Pengelolaan relasi aktor yang otonom
2. Menjaga interdependensi dan kerjasama
3. Mengelola sumber daya bersama
4. Memaksimalkan kemanfaatan bersama¹

Dengan adanya empat variabel ini dapat dijadikan acuan dalam penerapan network governance daalam program “Better Living in Malahing”. Dengan melakukan *network governance* ini terdapat keuntungan yang ada seperti saling bertukar informasi dan pengetahuan, menggunakan sumber daya secara efektif, meningkatkan kemampuan belajar dan membangun kepercayaan. Dengan mengurangi biaya negosiasi, pengawasan dan penegakan hukum, tata kelola jaringan diharapkan dapat meningkatkan potensi berbagai manfaat. *governance network* berfokus pada interaksi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik, dan strategi pemerintahan untuk menjembatani perbedaan antara aktor dalam penyelesaian kebijakan publik, program dan pelayanan publik. Pemilihan *governance network* sebagai focus studi karena sangat terkait erat dengan saling ketergantungan Pemerintah dan aktor lain, interaksi dan kompleksitas dari Pemerintah dan aktor lain dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan, program serta pelayanan publik lainnya. Bahwa pada faktanya juga setiap pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan publik memiliki kepentingan yang berbeda dan keterbatasan sumberdaya baik itu sumberdaya informasi, sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial, maka peran aktor lain penting.

¹ Mahfudah, Puput (2019) *Network Governance* dalam Pengembangan Sistem Pertanian Organikdi Kota Batu (Studi Pada Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu). Thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus mengenai pola interaksi yang terjadi pada proses pengelolaan CSR PT. Pupuk Kaltim serta mengetahui apakah pola yang terjadi dalam proses pembangunan dalam program ini apakah sudah sesuai dengan teori *network governance*. Dalam proses pengelolaan CSR PT. Pupuk Kaltim ini tidak terlepas peran dari Pemerintah Kota dan masyarakat yang menjadi aktor dalam terlaksananya pengelolaan CSR yang baik. Maka, penelitian ini mencari pola interaksi seperti apa yang dilakukan PT. Pupuk Kaltim, Pemerintah Kota dan Masyarakat dalam proses pengelolaan CSR ini. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah dalam proses penelitian ini terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana sikap masing-masing aktor dalam menyelesaikan masalah atau hambatan yang ada.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan mempelajari suatu fenomena lebih dalam. Hasil penelitian ini secara khusus akan bersumber dari data dan wawancara mendalam. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang sudut pandang topik penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena atau mendeskripsikan secara utuh pengalaman objek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis ini untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah digali secara mendalam untuk menjelaskan fenomena pertanyaan penelitian tersebut.

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian disini merupakan pihak-pihak yang akan menjadi penyedia informasi dan sumber data penelitian. Diharapkan penyedia

¹⁸ Mahfudah, Puput (2019) *Network Governance* dalam Pengembangan Sistem Pertanian Organik di Kota Batu (Studi Pada Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu). Thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

informasi atau konsultan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan data yang akurat untuk penelitian ini. Berikut adalah topik-topik yang akan dijadikan kebutuhan data dalam penelitian ini:

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pertanyaan diajukan secara lisan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Wawancara adalah teknik pengumpulan data utama yang digunakan untuk pengumpulan data dalam metode kualitatif. Wawancara didasarkan pada jumlah orang yang terlibat dalam proses wawancara, tingkat struktur, keakraban pewawancara dan partisipan, serta jumlah wawancara yang dilakukan selama periode penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan PT. Pupuk Kaltim (Departemen *Corporate Social Responsibility*), Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat sekitar areal pelaksanaan CSR PT Pupuk Kaltim.

Tabel 1.1 Informan penelitian

No.	Informan	Nama Informan
1	Ketua RT di Kampung Malahing	Nasir Lakada
2	Warga Kampung Malahing	Sarli
3	Penanggungjawab Program CSR PT Pupuk Kaltim <i>Better Living in Malahing</i>	Irma Safni
4	Dinas Kesehatan Kota Bontang	Metha Puspita Rina
5	<i>Community Development</i> CSR PT Pupuk Kaltim	-Ari Ristianti -Kurniawan Wicaksana -Dian Nurcahya
6	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang	Ramli, SE., M.Si
7	Lurah Tanjung Laut Indah	Nurfaidah

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, meneliti dokumen yang ada yang di berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut berupa laporan tertulis, arsip, buku, media masa, web atau apapun yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Data Sekunder

Teknik pengumpulan informasi dari dokumen, buku, jurnal artikel hingga berita di internet yang berhubungan dalam judul dan perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga terdapat dokumen peraturan dan undang-undang yang dijadikan penunjang dalam proses penelitian ini. Adanya dokumen penunjang dalam penulisan ini adalah Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan. Selain itu pengumpulan informasi dari berita-berita yang valid serta dokumen atau bacaan yang relevan dengan topik penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengorganisasian sistematis dari hasil transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lain yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menambah pengetahuan peneliti sendiri dan memungkinkan peneliti untuk melaporkan apa yang mereka temukan di pihak lain. Analisis data dilakukan dengan menganalisis dan mengorganisasi data, membaginya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, dan menemukan yang bermakna serta peneliti akan melakukan penelitian dan memutuskan cara pelaporan secara sistematis.

Setelah melakukan wawancara terhadap subyek – subyek penelitian yang telah ditetapkan dan melakukan artikulasi dan pendeskripsian data, Kemudian, hasil wawancara dan observasi yang telah didapatkan akan disesuaikan dengan data sekunder sebagai data pendukung pada penelitian. Namun tidak hanya itu, penulis juga menganalisis mengenai data yang didapat. Penulis juga meneliti dengan berbagai narasumber yang sudah ditargetkan guna memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, kesimpulan dari analisis dilakukan sebagai bentuk hasil dari sistem penelitian yang menunjukkan bahwa data yang dibutuhkan telah ditemukan.